CIMAHI	NOMOR SOP	
	TGL.PEMBUATAN	
	TGL.REVISI	
	TGL.EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Pengelola Keuangan
COLONG 4 MANGUN JATT MANGUN		dan Aset Daerah Kota Cimahi
DADAN DENICELOLA VELLANICANI		
BADAN PENGELOLA KEUANGAN		
DAN ASET DAERAH		
KOTA CIMAHI	NAMA SOP	Pembuatan Surat Edaran Asistensi RKA SKPD
KO 17 CHVI/ CH		Terpusat
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003	Ka. Sub. Bid. Perencanaan A	Anggaran
tentang Keuangan Negara		
2. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang		
Perbendaharaan Negara		
3. Undang-undang No 25 Tahun 2004		
tentang sistem Perencanaan		
Pembangunan Nasional		
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun		
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		
5. Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang		
tentang Perubahan Permendagri 59		
Tahun 2011 tentang Pedoman		
Pengelolaan Keuangan Daerah		
6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28		
Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok		
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola		
Keuangan dan Aset Daaerah Kota Cimahi		
3		
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPA	N:
1. SOP Sekretariat Badan	1. Alat Tulis Kantor	
2. SOP Bidang Perencanaan Anggaran dan	2. Komputer	
Aset	3. Internet	
	4. Alat Komunikasi	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDAT	TAAN:
Apabila Pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja	Disimpan sebagai data elek	tronik dan manual
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah		
(RKA-SKPD)terlambat dilaksanakan maka		
penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran		
SKPD akan tertunda		

No.	Kagiatan		Pelak	sana			Mutu Baku		Vot
NO.	Kegiatan	Kaban	Kabid	Kasubid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Kaban memerintahkan kabid perencanaan anggaran dan aset untuk melaksanakan asistensi rka skpd secara terpusat					Disposisi	5 menit	Tanda terima	
2.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran dan Aset memerintahkan kepada kepala sub bid anggaran untuk menyusun surat beserta jadwal asistensi rka terpusat					- Disposisi	2 jam	RKA yang telah diverifika si	

No	Kogiatan		Pelak	sana			Mutu Baku		Vot
No.	Kegiatan	Kaban	Kabid	Kasubid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
3.	Kepala Sub Bid Anggaran mengonsep surat beserta jadwal dan menyerahkan kembali kepada kepala bidang anggaran					Draft Surat dan Jadwal	3 minggu	Tanda terima	
4.	Kepala Bidang Anggaran mengkoreksi jadwal asistensi, apabila setuju maka diparaf dan diteruskan kepada kepala Badan, apabila tidak maka dikembalikan kepada kepala subid anggaran untuk dikoreksi	Tidak	Ya			Draft Surat dan Jadwal	2 minggu	Tanda Terima	
5.	Kepala Badan menandatangani surat dan diserahkan kepada kepala su bid anggaran untuk didokumentasikan	•							
6.	Kepala Sub Anggaran memerintahkan staff untuk mendokuemntasikan dan mendistribusikan surat tersebut		,						
7.	Staff mendokementasikan dan mendistribusikan surat								

	NOMOR SOP	
CIMAHI	TGL.PEMBUATAN	
	TGL.REVISI	
	TGL.EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Pengelola Keuangan
Rep. J.		dan Aset Daerah Kota Cimahi
CAGAWANGUN JATI NA		
BADAN PENGELOLA KEUANGAN		
DAN ASET DAERAH	NAMA SOP	
КОТА СІМАНІ		Pelaksanaan Asistensi RKA Terpusat
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003	Ka. Sub. Bid. Perencanaan	Anggaran
tentang Keuangan Negara		
2. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang		
Perbendaharaan Negara		
3. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan		
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional		
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun		
2005 tentang Pengelolaan Keuangan		
Daerah		
5. Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang		
tentang Perubahan		
KeduaatasPermendagri 13 Tahun 2006		
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan		
Daerah		
6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28		
Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola		
Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi		
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPA	AN:
SOP Sekretariat Badan	 Alat Tulis Kantor 	
2. SOP Bidang Perencanaan Anggaran dan	2. Komputer	
Aset	3. Internet	
DEDINICATAN	4. Alat Komunikasi	TAAN
PERINGATAN: Apabila Pelaksanaan verifikasi Dokumen	PENCATATAN DAN PENDA	
Apabila Pelaksanaan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat	Disimpan sebagai data ele	KUONIK UAN MANUAI
Daerah (DPA-SKPD) danDokumen Pelaksanaan		
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat		
Daerah (DPPA-SKPD)terlambat dibuat maka		
pelaksanaan kegiatan SKPD akan tertunda		

NI -	Vi-t		Pela	aksana		Mutu Baku			17 - 4
No.	Kegiatan	Kaban	Kabid	Kasubid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Kepala Badan memerintahkan Kepala Bidang untuk pelaksanaan asistensi rka					DIsposisi	5 menit	Tanda Terima	
2	Kepala Bidang memerintahkan Kepala Sub Bidang untuk melaksanakan pembagian tugas dalam melakukan asistensi rka		•						
3.	Kepala Sub Bidang Anggaran memerintahkan staff untuk melakukan asistensi rka sesuai dengan bina wilayahnya berdasarkan peraturan yang berlaku			•		- Surat Tugas - RKA SKPD - KUA-PPAS - APBD	2 jam	DPA yang telah diverifikasi	

4	Staff melakukan verifikasi rka melalui lembar asistensi dan selanjutnya diberi tanda paraf untuk diteruskan kepada kepala sub bidang anggara			-Lembar Asistensi -RKA yang telah diverifikasi	3 minggu	Draft Penjabara n APBD	
5	Kepala Sub Bid anggaran melakukan verifikasi atas RKA yang diajukan oleh SKPD setelah melalui proses asistensi staff, lalu menyampaikannya kepada kepala bidang anggaran untuk diteliti lebih lanjut			-Lembar Asistensi -RKA yang telah diverifikasi			
6	Kepala Bidang anggaran menandatangani lembar asistensi rka skpd dan memerintahkan kepada skpd untuk segera mengupdate data ke dalam aplikasi			-Lembar Asistensi -RKA yang telah diverifikasi			

CIMAHI	NOMOR SOP	
	TGL.PEMBUATAN	
	TGL.REVISI	
	TGL.EFEKTIF	
E S	DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Pengelola Keuangan
CIZ MGAMANGUN JATIMAM		dan Aset Daerah Kota Cimahi
BADAN PENGELOLA KEUANGAN		
DAN ASET DAERAH		
-	NAMA SOP	Pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan
KOTA CIMAHI		rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	5 1
1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003	Ka. Sub. Bid. Perencanaan	Anggaran
tentang Keuangan Negara		
2. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang		
Perbendaharaan Negara		
3. Undang-undang No 25 Tahun 2004		
tentang sistem Perencanaan		
Pembangunan Nasional		
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun		
2005 tentang Pengelolaan Keuangan		
Daerah		
5. Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang		
tentang Perubahan		
KeduaatasPermendagri No 13 Tahun 2006		
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan		
Daerah		
6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28		
Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok		
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola		
Keuangan dan Aset Daaerah Kota Cimahi		
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPA	AN:
1. SOP Sekretariat Badan	Alat Tulis Kantor	
2. SOP Bidang Perencanaa Anggaran dan	2. Komputer	
Aset	3. Internet	
	4. Alat Komunikasi	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDA	TAAN:
Apabila Laporan Pelaksanaan penyiapan	Disimpan sebagai data ele	ktronik dan manual
bahan nota keuangan rancangan APBD dan		
rancangan perubahan APBD terlambat dibuat		
maka pelaksanaan perencanaan berikutnya		
akan tertunda		

No	Kogiatan		Pela	ksana		N	Mutu Baku		
No.	Kegiatan	Kaban	Kabid	Kasubid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Kaban memerintahkan untuk pembuatan pengajuan nota keuangan								
1.	Staf bagian perencanaan anggaran mengumpulan bahan dari R-APBD					RKA SKPD, Permendagri Pengelolaan Keuangan	3 minggu	Bahan penyusun annota keuangan dan RKA semua SKPD terkump ul	
2.	Staf bagian perencanaan anggaran menyusun Draft Nota Keuangan dan menyerahkannya ke Kasubid					Rekapitulasi RKA semua SKPD	2 jam	Draft Nota Keuanga n	

No	Vogiatan		Pela	ksana		M	utu Baku		Vot
No.	Kegiatan	Kaban	Kabid	Kasubid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
3.	Kasubid menyerahkan Pengajuan draft Nota Keuangan kepada Kabid					Draft Nota Keuangan	1 jam	Draft Nota Keuangan yang telah disetujui Kepala Badan	
4.	Kabid mengajukan Persetujuan Nota Keuangan kepada Walikota					Draft Nota Keuangan yang telah disetujui Kepala Badan	15 menit	Nota Keuanga n	

CIMAHI	NOMOR SOP	
	TGL.PEMBUATAN	
	TGL.REVISI	
	TGL.EFEKTIF	
**************************************	DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Pengelola Keuangan
OUNGAWANGUN JATTHAT		dan Aset Daerah Kota Cimahi
BADAN PENGELOLA KEUANGAN		
DAN ASET DAERAH		
KOTA CIMAHI	NAMA SOP	Pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan
		rancangan Perubahan Anggaran
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang	Ka. Sub. Bid. Perencanaan	Anggaran
Keuangan Negara		
2. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang		
Perbendaharaan Negara		
3. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang		
sistem Perencanaan Pembangunan		
Nasional		
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun		
2005 tentang Pengelolaan Keuangan		
Daerah		
5. Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan KeduaAtasPermendagri		
13 Tahun 2006 tentang Pedoman		
Pengelolaan Keuangan Daerah		
6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28		
Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok		
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola		
Keuangan dan Aset Daaerah Kota Cimahi		
J J		
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAPA	AN:
SOP Sekretariat Badan	1. Alat Tulis Kantor	
2. SOP Bidang Perencanaan Anggaran dan	2. Komputer	
Aset	3. Internet	
	4. Alat Transportasi	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDA	
Apabila Pelaksanaan penyusunan rancangan	Disimpan sebagai data elel	ktronik dan manual
APBD dan rancangan perubahan anggaran		
terlambat dibuat maka pelaksanaan APBD		
akan tertunda		

No	Vagiatan		Pela	ksana			Mutu Bakı	J	Vot
No.	Kegiatan	Kaban	Kabid	Kasubid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
	Kaban memerintahkan untuk melaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan Anggaran								
1.	Staf Bagian Perencanaan anggaran mengentry data RKA, mencetak draft RKA dan menyerahkan kepada Kasubid				•	RKA	3 minggu	Draft Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD	
2.	Kasubid Memeriksa draft APBD dan Penjabaran APBD, jika tidak setuju mengembalikan kepada staf untuk diperbaiki, jika setuju menyerahkan kepada Kabid		Tidak	Ya		Draft Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD	3 hari	Draft Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD	

			Pela	ksana			Mutu Baku	<u> </u>	
No.	Kegiatan	Kaban	Kabid	Kasubid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
3.	Kabid memeriksa draft APBD dan Penjabaran APBD, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki, jika setuju menyerahkan kepada Kaban	Tidak				Draft Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD	1 jam	Draft Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD	
4.	Kaban menerima draft APBD dan Penjabaran APBD jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid, jika setuju mengirim Draft Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD	Ya	Ya Tidak			Draft Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD	15 menit	Draft Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD	
5.	Kaban membahas Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Cimahi, Badan Anggaran DPRD, apabila disetujui dilanjutkan ke Walikota dan Pimpinan DPRD kemudian menyerahkan kepada Kabid untuk dikirim ke Propinsi					Draft Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD	1 bulan	Draft Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD	
6.	Kabid menerima Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD yang telah disetujui Walikota dan Pimpinan DPRD kemudian menyerahkan kepada Kasubid					Draft Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD	15 menit	Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD	
7.	Kasubid menerima Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD yang telah disetujui Walikota dan Pimpinan DPRD kemudian mengirimkannya ke Propinsi bersama staf					Buku Rancangan APBD/Buku Rancangan Perubahan APBD	1 hari	Tanda terima dari Propinsi	

CIMAHI	NOMOR SOP				
	TGL.PEMBUATAN				
	TGL.REVISI				
	TGL.EFEKTIF				
E. J.	DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Pengelola Keuangan			
TO A GAINANGUN JATHAN		dan Aset Daerah Kota Cimahi			
BADAN PENGELOLA KEUANGAN					
DAN ASET DAERAH					
KOTA CIMAHI	NAMA SOP	Denversings Standar Satuan Harga (SSH)			
	NAMA SUP	Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)			
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :				
1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003	Ka. Sub. Bid. Penyusunan	Aset			
tentang Keuangan Negara					
2. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang					
Perbendaharaan Negara					
3. Undang-undang No 25 Tahun 2004					
tentang sistem Perencanaan					
Pembangunan Nasional					
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun					
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah					
5. Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang					
tentang Perubahan Kedua Atas					
Permendagri 13 Tahun 2006 tentang					
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah					
6. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 28					
Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pokok					
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola					
Keuangan dan Aset Daaerah Kota Cimahi					
KETERKAITAN:	PERALATAN PERLENGKAP	AN:			
1. SOP Sekretariat Badan	1. Alat Tulis Kantor				
2. SOP Bidang Anggaran	2. Komputer				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDA	ATAAN:			
Apabila Standar Satuan Harga Tahun 2016	Disimpan masing-masing SKPD sebagai dokumen untuk penyusunan RKA SKPD				
terlambat disusun maka SKPD mengalami	Tahun Anggaran 2016 dan sebagai bahan bukti jika diperlukan (Pemeriksaan BPK				
kesulitan dalam menyusun RKA SKPD Tahun	dan Inspektorat atau keperluan lain untuk kepentingan dinas sesuai ketentuan				
Anggaran 2016	peraturan perundang-und	langan)			
	1				

No	Kogiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
INO	Kegiatan	Kaban	Kabid	Kasubid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Kaban memerintahkan kepada kasubid untuk membuat konsep surat edaran Kepala BPKAD					-			
2	Kasubid memerintahkan kepada staf untuk membuat konsep surat edaran Kepala BPKAD kepada semua Kepala SKPD untuk mengusulkan SSH					-Konsep Surat Edaran	30 menit	Konsep Surat Edaran siap dikoreksi	
3	Kabid melakukan koreksi konsep Surat Edaran Kepala BPKAD kepada semua Kepala SKPD untuk mengusulkan SSH, jika setuju memberikan paraf dan meminta tandatangan Kaban dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki	Tidak	Ya			Konsep Surat Edaran	5 menit	Konsep Surat Edaran siap disampaika n Kabid	

No	Kegiatan		Pelaks				lutu Baku	T	Ket
		Kaban	Kabid	Kasubid	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Net
4	Kaban melakukan koreksi konsep Surat Edaran Kepala BPKAD kepada semua Kepala SKPD untuk mengusulkan SSH, jika setuju memberikan tandatangan dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki		Tidak			Konsep Surat Edaran siap disampaikan Kabid	15 menit	Surat Edaran yang sudah ditanda- tangani Kepala BPKAD	
4	Kabid menerima surat edaran yang telah ditandatangani oleh Kaban dan memerintahkan kepada Kasubid untuk menghimpun usulan SSH SKPD serta menyiapkan Rancangan Perwal SSH beserta lampirannya sekaligus melakukan diskusi internal tentang konsep Perwal SSH dan lampirannya ditingkat Bidang Anggaran	Ya				- Surat Edaran - Usulan SSH SKPD - Draft Rancangan Perwal SSH	5 hari	- Tanda terima	
5	Kasubid melakukan revisi draft Perwal SSH dan lampirannya kemudian diserahkan kepada Kabid untuk dikoreksi			1			2 hari	Hasil revisi draft Perwal SBU dan lampirann ya	
6	Kabid menerima hasil revisi draft Perwal SSH dan lampirannya, jika setuju memberikan paraf dan diberikan kepada Kaban untuk memberikan tandatangan dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki	Ya		Tidak		Draft Perwal SSH dan lampirannya	30 menit	Koreksi draft Perwal SSH dan lampirann ya	
7	Kaban menerima dan memeriksa draft Perwal SSH dan lampirannya serta mengadakan rapat tim bersama Kabid dan Kasubid yang membidangi (minimal 3 kali)					Draft Perwal SSH dan lampirannya	30 menit	Koreksi draft Perwal SSH dan lampirann ya	
8	Kabid melakukan revisi (bersama tim) draft Perwal SSH dan lampirannya (hasil rapat dengan tim) yang akan diserahkan kepada Kaban					Draft Perwal SSH dan lampirannya	5 hari kerja	Draft Perwal SSH dan Iampirann ya	
9	Kaban menerima draft Perwal SSH dan lampirannya serta mengadakan rapat finalisasi draft Perwal SSH dan lampirannya (hasil rapat dengan tim), jika setuju dan tidak ada revisi memberikan tandatangan, jika tidak setuju dan ada revisi dikembalikan pada Kabid	Ya		Tidak		Draft Perwal SSH dan lampirannya	2 (dua) kali rapat	Draft Perwal SSH dan lampirann ya	

No	V a sinta a	Pelaksana					Mutu Baku			
No	Kegiatan	Kaban	Kabid	Kasubid	Staf	f	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
10	Kabid memerintahkan kepada Kasubid untuk menyerahkan draft Perwal SSH dan lampirannya kepada Bagian Hukum untuk diproses lebih lanjut		+				Surat pengantar	30 menit	Tanda terima bukti pengirima n dari Bagian Hukum	
11	Kasubid menerima Perwal SSH dan lampirannya yang telah ditandatangani oleh Walikota dan memerintahkan staf untuk menggandakan Perwal SSH dan lampirannya sebagai bahan sosialisasi Perwal SSH Tahun 2016 dan lampirannya						Perwal SSH dan lampirannya	30 menit	Perwal SSH dan lam- pirannya sebanyak 125 buku	
12	Staf menerima Perwal SSH dan lampirannya yang telah di- tandatangani oleh Walikota untuk dilakukan peng-gandaan sebagai bahan sosialisasi Perwal SSH Tahun 2016 dan lampirannya						Perwal SSH dan lampirannya Tempat pertemuan/ rapat	5 hari	Terlaksan a-nya sosialisasi Perwal SSH Tahun 2016 kepada semua SKPD	